

Analisis Kebijakan Pembinaan Tenaga Kerja Pedesaan : Studi Kasus Di Pulau Jawa

Akhmad Shariefuddin Rauf, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=77235&lokasi=lokal>

Abstrak

Tenaga kerja di pulau Jawa berkembang sesuai dengan perkembangan penduduk. Menurut BPS pertumbuhan penduduk di Indonesia rata-rata pertahun 2,13 %. Perkembangan penduduk dan perkembangan tenaga kerja memerlukan usaha penyediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja. Karena sebahagian besar penduduk bermukim di desa-desa, maka masalah tenaga kerja dan lapangan kerja juga melanda perkembangan desa. Untuk mengatasi hal tersebut ditetapkan kebijakan tentang tenaga kerja. Dalam kenyataannya masih ada kesenjangan antara upaya dan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Inilah yang menarik kami untuk mencoba mengadakan suatu analisis tentang kebijakan tenaga kerja khususnya tenaga kerja pedesaan dengan mengambil kasus di pulau Jawa.

Untuk dapat melakukan kegiatan analisis, diperlukan berbagai data yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengindikasikan dan membandingkan antara kebijakan yang sedang berlaku dengan berbagai kemungkinan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat pedesaan sekarang ini. Kebijakan-kebijakan tentang tenaga kerja ditetapkan melalui GBHN dan REPELITA serta keputusan-keputusan pemerintah lainnya. Data tentang ketenagakerjaan penulis himpun dari Biro Pusat Statistik (BPS); dengan memilih dan memilah-milah data ketenagakerjaan khususnya di pedesaan pulau Jawa. Selain itu, diusahakan pula untuk mendapatkan berbagai informasi-informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tentang pembinaan tenaga kerja pedesaan.

Masalah tenaga kerja bukan hanya mempengaruhi bidang kependudukan tetapi lebih luas dari pada itu. Pertumbuhan kebutuhan lapangan kerja yang diperlukan tidak seimbang dengan pertumbuhan tenaga kerja. Faktor-faktor kriminalitas dan penyakit sosial lainnya dapat merupakan dampak negatif dan tidak teratasinya masalah pengangguran. Ironisnya, tenaga kerja di pulau Jawa berlimpah tetapi ketersediaan lapangan kerja yang ada tumbuh sangat terbatas, sedangkan di luar pulau Jawa kemungkinan lapangan kerja terbuka luas tetapi tenaga kerja tumbuh sangat lambat. Memindahkan tenaga kerja melalui program transmigrasi atau bentuk migrasi lainnya tidaklah mudah karena memerlukan biaya dan fasilitas yang akan menelan jumlah rupiah yang sangat besar.

Kami berusaha untuk menganalisis masalah tenaga kerja pedesaan di pulau Jawa dengan menggunakan analisis yang komprehensif dengan pendekatan yang interdisipliner. Sesuai pilihan, analisis itu dilakukan dengan menggunakan teori-teori dari DUNN dan KUNTORO MANGKUSUBROTO serta C.

LESTIARINI.

Dari hasil analisis itu kami menemukan pokok masalah tenaga kerja pedesaan di pulau Jawa ini adalah karena tidak mempunyai disediakan lapangan kerja bagi para penganggur yang membutuhkannya. Sekaligus kami mengemukakan adanya 3 (tiga) kemungkinan terpilih dari beberapa alternatif yang tersusun untuk mengatasi masalah tersebut (1) peningkatan pengetahuan tenaga kerja melalui pendidikan, penyuluhan, latihan dan teknologi (peningkatan Sumber Daya Manusia), (2) penyediaan lapangan kerja, dan (3) penyebaran tenaga kerja.

Ketiga alternatif terpilih itu kami uji dengan " model diagram keputusan dengan mengkaji sampai kepada nilai kejadian yang diusahakan dinilai dengan rupiah, apakah positif atau negatif. Dari pengujian tersebut ternyata bahwa alternatif yang paling positif adalah upaya mengatasi masalah tenaga kerja pedesaan melalui penyediaan lapangan kerja. Upaya lainnya dapat merupakan suplemen dari upaya terpilih tersebut. Dengan demikian Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk membuat kebijakan ketenagakerjaan untuk 5 (lima) tahun mendatang, atau mengkaitkan semua kegiatan instansi-instansi peminintah, yang dapat memenuhi upaya penyediaan lapangan kerja tersebut.